

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang ada di Indonesia sudah dimulai sejak zaman dahulu. Pengelola keuangan dimiliki setiap negara dalam pemerintahannya untuk memastikan kemajuan pembangunan di setiap sektor dalam pemerintahan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Menurut Hamzah & Kustiani (2014) dalam bukunya disebutkan bahwa reformasi dalam bidang keuangan negara yang dialami Indonesia secara komprehensif melahirkan beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, diantaranya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Setelah masa reformasi ini, pada tahun 2005 diberlakukan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan pendekatan *cash towards accrual*. Dalam praktiknya, tahun 2015 terjadi perubahan sistem pencatatan akuntansi yang awalnya menggunakan pendekatan *cash towards accrual* menjadi *full accrual accounting* sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena pendekatan

ini dianggap lebih relevan dan lebih menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

Pendekatan *full accrual accounting* mulai diterapkan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Salah satu pos keuangan yang sangat terpengaruh oleh penggantian pendekatan dari *cash towards accrual* menjadi *full accrual accounting* adalah bagian pendapatan. Dalam pendekatan *full accrual accounting*, pendapatan dibagi dalam dua kategori, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan kemudian dikelompokkan lagi menjadi tiga berdasarkan sumbernya, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

Seperti yang tertulis dalam Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti (2016) bahwa pendapatan terbesar negara Indonesia adalah bersumber dari pajak, yang mana pendapatan perpajakan sendiri bersumber dari semua pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, perpajakan merupakan salah satu hal yang signifikan bagi pendapatan Indonesia. Menurut Kurniasari, Suharyono, & Kesuma (2016), pembangunan nasional sangat didukung dengan penerimaan negara dimana sektor pajak merupakan sektor dalam penerimaan negara yang paling dominan dalam mendukung upaya pembangunan nasional ini. Kesejahteraan sosial serta pendapatan yang terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat juga dapat tercapai jika penerimaan perpajakan dikelola secara optimal

Seiring berkembangnya negara Indonesia, sektor keuangannya pun ikut berkembang. Menurut Inggrid (2006) berkembangnya sektor keuangan, dapat

menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan negara ini. Namun, pada awal tahun 2020 virus corona mulai mewabah menyebar di hampir seluruh penjuru dunia. Gejolak pandemi ini akhirnya juga sampai dan meluas di Indonesia sehingga membuat perkembangan yang sudah diusahakan di berbagai sektor pun ikut terdampak, khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian (Armelia dkk, 2020). Banyaknya masyarakat yang terinfeksi virus ini mengharuskan pemerintah untuk memberlakukan lockdown bagi seluruh masyarakat serta melakukan pengawasan ketat terkait hal tersebut guna menekan angka penularan COVID-19. Seperti halnya di Balikpapan, pemerintah setempat juga mengeluarkan kebijakan terkait pandemi ini. Dilansir dari artikel web.balikpapan.go.id (2020) Balikpapan mulai melakukan pengetatan sosial atau karantina wilayah guna mengantisipasi virus Corona yang semakin meluas di Balikpapan.

Sementara itu, untuk merespon beberapa sektor yang mengalami pengaruh COVID-19, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap UU yang berlaku. Sebagai contoh, terdapat beberapa peraturan di bidang perpajakan yang dibuat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020

tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sehubungan dengan penerbitan peraturan-peraturan tersebut, terdapat beberapa penyesuaian dalam menghimpun pendapatan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), salah satunya adalah KPP Pratama Balikpapan Timur.

KPP Pratama Balikpapan Timur merupakan salah satu instansi vertikal DJP yang ikut terdampak pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan perpajakan di Kota Balikpapan sebagai topik dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Perpajakan Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Balikpapan Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Bagaimana klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur?

3. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan serta mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur;
2. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur; dan
3. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan, penulis membatasi ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini hanya pada meninjau dampak pandemi COVID-19 terhadap akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur periode Tahun Anggaran 2019-2020 saja. Penulis akan membandingkan kesesuaian antara akuntansi pendapatan perpajakan yang diterapkan di KPP Pratama Balikpapan Timur dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, PMK Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan PMK Nomor

225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta PMK 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat akademis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di suatu instansi dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian yang menghasilkan karya tulis ini, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat membawa dampak yang baik bagi semua pihak yang terlibat, diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk evaluasi kebijakan dalam penyusunan anggaran pada masa pandemi.
- b. Bagi PKN STAN, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan maupun referensi bagi mahasiswa yang akan mengerjakan karya

tulis tugas akhir atau yang akan melaksanakan PKL khususnya di KPP Pratama Balikpapan Timur

- c. Bagi penulis, hasil maupun proses dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dalam hal menulis sebuah karya tulis juga memberikan kontribusi nyata yang dapat diterapkan penulis di dunia kerja nantinya

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum peninjauan pada karya tulis tugas akhir, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini dibuat penulis untuk menjelaskan teori yang melandasi pembahasan karya tulis yang sesuai dengan topik yang diambil yaitu mengenai pendapatan perpajakan pada masa pandemi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberi penjelasan tentang metode pengumpulan data yang sesuai dengan topik karya tulis ini serta gambaran objek yang dipilih. Selain itu, penulis juga memaparkan pembahasan mengenai topik karya tulis ini, yaitu Tinjauan atas Pendapatan Perpajakan pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Balikpapan Timur.

BAB IV SIMPULAN

Penutup dari karya tulis ini ada pada Bab IV. Kesimpulan dari seluruh isi karya tulis dijelaskan pada bab ini dengan memberikan beberapa poin yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya